

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

---

**ETIKA KOMUNIKASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM MENERTIBKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS  
(GEPENG) KECAMATAN BATHIN SOLAPAN DURI  
KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)  
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Riau



**MUHAMMAD JHEFRY**

NPM : 179110009

PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI

KONSENTRASI : HUMAS

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jhefry  
NPM : 179110009  
Tempat/Tanggal lahir : Duri, 01 Februari 1999  
Bidang Konsentrasi : Humas  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
FAKULTAS : Ilmu Komunikasi  
Alamat/ No Hp : Jl. Kartama, Gg. Bersama Marpoyan Damai /  
082172495581  
Judul Penelitian : Etika Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja  
Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis  
(Gepeng) Kecamatan Bathin Solapan Duri  
Kabupaten Bengkalis

Dengan ini menyatakan bawah:

1. Karya tulisan saya (skripsi) adalah asli dan belum pernah mengajukan untuk mendapatkan gelar akademi, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengaruh Tim Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia untuk mempublikasikan Karya tulis saya (skripsi) di jurnal fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpanan dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai skripsi dan atau pencabutan gelar akademik kesarjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2021  
Menyatakan,

Muhammad Jhefry  
179110009

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat ALLAH Subahanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan ridha, rahmat, dan hidayah kepada setiap hamba yang mau berusaha maupun yang belum benar-benar berusaha. Serta Shalawat beriringkan salam kepada ruh jungjungan alam, Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallahm yang kelak kita harapkan syafaat beliau di yaumul mahsyar nanti.

Tugas akhir ini dipersembahkan pada pihak-pihak yang telah memberikan saya dukungan penuh dalam hal ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, adalah Keluarga saya tercinta, ayah saya, bapak Muhammad Nazrin, ibu Leni Marlina, adik saya yang saya sayangi Muhammad Choiry, saudara-saudara terdekat saya, yang saya sayangi dan selalu mendukung saya baik dalam bentuk moril maupun materil.

Teman-teman kampus saya yang selalu ada untuk menemani dan mau membantu saya dan menyemangati saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya ini, termasuk teman-teman sepermainan saya yang diluar yang mendoakan saya untuk tetap kuat dan semangat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komunikasi maupun petugas TU yang membantu melancarkan pengerjaan maupun pengurusan tugas akhir ini. Juga kepada semua pihak-pihak yang terkait dalam pengerjaan tugas akhir saya ini tidak dapat saya ucapkan satu persatu, saya mengucapkan Syukron jazakumullah khairan katsiran semoga Allah jallawa'ala membals kebaikan kalian semua aamiin yaa rabbal'alamiin.

## MOTTO

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintai bagaikan Tak pernah disakiti. Manarilah bagaikan tak seorang pun Sedang menonton  
(Mark Twain)

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui  
(Aristotle Onassis)

*The aim of education should be to teach us rather how to think, than what to think – rather to improve our minds, so as to enable us to drink for ourselves, than to load the memory with thoughts of other men*

(Bill Beattie)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Etika Komunikasi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis”**. yang diajukan dengan tujuan melakukan penelitian sebagai tugas akhir peneliti dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak sekali mendapatkan dukungan serta bantuan dari banyak pihak. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada:

1. Dr. Muhd Ar. Imam Riauan, S.sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Eka Fitri Quniawati, M.I.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan Motivasi, pendapat dan masukan yang sangat berarti hingga peneliti sampai di saat sekarang ini.
3. Harry Setiawan, M.I.Kom selaku ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
4. Cutra Aslinda , M. I. Kom selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan.

5. Yudi Dermawan, M. I. Kom dan Dyah Pithaloka, M. Si selaku dosen penguji saya yang telah banyak memberi dukungan dan juga saran bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang telah membantu mengurus surat menyurat selama perkuliahan.
8. Orang tua tercinta Ayah (Muhammad Nazrin S.H) Ibu (Leni Marlina) dan juga keluarga yang turut memberikan dukungan serta do'a.
9. Dinda Rahma Yani S.Pd yang telah mensupport dan do'a, serta penyemangat dan penghibur dalam kesedihan sehingga peneliti bisa menjadi seperti ini.
10. Teman-teman, Novi, Diza, Putra, widia, fani, rahmad yang telah banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Namun peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih perlu mendapatkan perhatian dari berbagai sisi. oleh karena itu, peneliti dengan lapang dada menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun sehingga peneliti dapat memaksimalkan penulisan skripsi ini.

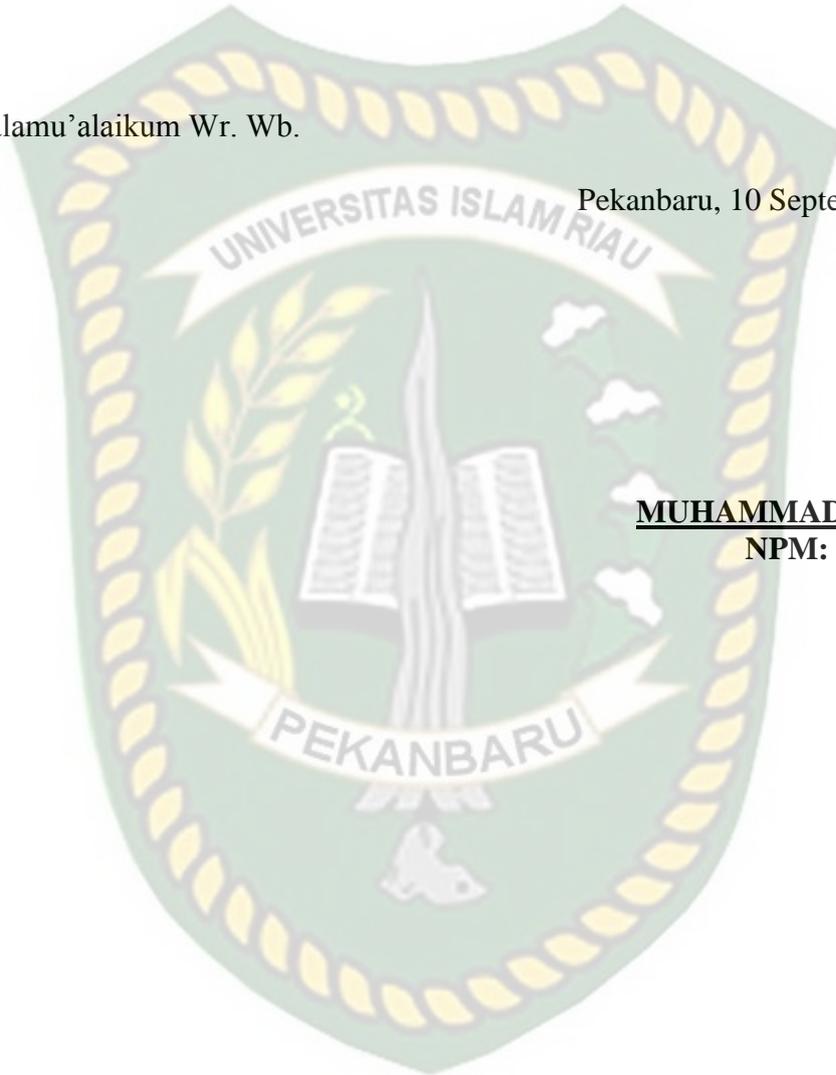
Agar dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang baik nantinya. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 September 2021

Peneliti

**MUHAMMAD JHEFRY**  
**NPM: 179110009**



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul Skripsi</b>	
<b>Persetujuan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan</b>	
<b>Persembahan .....</b>	<b>i</b>
<b>Motto .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>x</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xi</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Literatur.....	13
1. Etika.....	13
2. Komunikasi.....	15
3. Satuan Polisi Pamong Praja.....	16
4. Etika komunikasi .....	18
A. Komunikasi Efektif .....	19
5. Gepeng.....	22
6. Menertibkan.....	23
B. Definisi Operasional .....	23
1. Etika komunikasi .....	23
2. Komunikasi Efektif.....	23

3. Satuan Polisi Pamong Praja.....	24
4. Gepeng.....	24
5. Menertibkan.....	24
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	24

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
1. Subjek Penelitian.....	32
2. Objek Penelitian.....	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
1. Lokasi Penelitian.....	35
2. Waktu Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
1. Data Primer.....	37
2. Data Sekunder.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi.....	38
2. Wawancara.....	39
3. Dokumentasi.....	41
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	43
1. Reduksi Data.....	44
2. Penyajian Data.....	45
3. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi.....	46

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Singkat Dinas Satpol PP.....	47
2. Detail Lokasi Daerah.....	48
3. Struktur Satpol PP.....	50
4. Visi dan Misi Satpol PP.....	51

5. Kegiatan Penertiban Gepeng oleh Satpol PP.....	52
B. Hasil Penelitian.....	54
1. Etika Satpol PP Dalam Menertibkan Gepeng.....	55
C. Pembahasan Penelitian .....	59

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Wawancara.....	71
2. Dokumentasi Wawancara.....	73
3. SOP.....	78
4. Biodata Peneliti .....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	22
Tabel 3.1 Rencana Penelitian.....	33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data ( <i>interactive model</i> ) .....	41
Gambar 4.1 Struktur Satuan Polisi Pamong Praja .....	47
Gambar 4.2 Kegiatan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis oleh Satpol PP..	49
Gambar 4.3 Kegiatan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis oleh Satpol PP..	50
Gambar 4.4 Kegiatan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis oleh Satpol PP..	50



## Abstrak

### **Etika Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis**

**Muhammad Jhefry**  
**Npm: 179110009**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya timbul persepsi masyarakat mengenai Satuan Polisi Pamong Praja melalui Gelandangan dan Pengemis yang mana dalam pandangan masyarakat penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja itu dilakukan dengan cara kekerasan dan tidak sesuai dengan tatanan moral. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui etika komunikasi yang di gunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis berdasarkan data kualitatif. Subjek adalah dua orang gelandangan dan pengemis, satu komandan Satuan Polisi Pamong Praja (Muhammad Nazrin) dari Kecamatan Bathin Solapan, dua orang masyarakat sekitar. Hasil dari penelitian ini adalah etika komunikasi Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan pengemis di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku, adanya pengaduan yang jelek dari Gelandangan dan Pengemis mengenai nada yang tinggi atau bahasa yang kurang baik kepada mereka (Gepeng) dapat dikatakan karena Gepeng nya sendiri yang tidak bisa di peringati dan terus mengulangi kegiatannya. mengenai nada yang tinggi karena pada hakikatnya manusia juga ada batas kesabarannya termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan itu juga atas dasar ketegasan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

**Kata kunci:** etika komunikasi, satuan polisi pamong praja, gelandangan dan pengemis.

## **Abstract**

### ***Communication Ethics of the Civil Service Police Unit in Controlling Homeless and Beggars (Gepeng) Bathin Solapan Duri District, Bengkalis Regency***

**Muhammad Jhefry**  
**Npm: 179110009**

*This research is motivated by the many public perceptions of the Civil Service Police Unit through Gepeng which in the public's view the control carried out by the Civil Service Police Unit is carried out using violence and is not following the moral order. The purpose of this study was to determine the communication ethics used by the Civil Service Police Unit in controlling the sprawl in Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. The method used in this research is the descriptive analysis method based on qualitative data. The subjects were two homeless people and beggars, one commander of the Civil Service Police Unit (Muhammad Nazrin) from Bathin Solapan District, two people from the surrounding community. The results of this study are that the communication ethics of Civil Service Police Unit Officers in controlling homeless and beggars in Bathin Solapan Duri District, Bengkalis Regency is following applicable rules and SOPs, bad complaints from Gepeng regarding high notes or bad language to them (Gepeng ) you could say because the gepeng itself cannot be commemorated and its activities are repeated over and over again. about a high tone because in essence humans also have a limit to their patience, including the Civil Service Police Unit and also based on the firmness of the Civil Service Police Unit.*

**Keywords:** *communication ethics, civil service police units, homeless people, and beggars.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan bantuan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk berkomunikasi. Pentingnya komunikasi dengan manusia adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri manusia, begitu juga halnya organisasi. Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui tanggung jawab. Komunikasi dimulai manusia mulai dari lahir, ia sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat sekelilingnya. Kelompok masyarakat pertama yaitu keluarga. Keluarga berbicara menyampaikan suatu hal kepada anak melalui komunikasi.

Tujuan dalam kegiatan komunikasi adalah menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain, dan utamanya adalah upaya untuk mempengaruhi pihak lain. Pihak lain yang di maksud adalah orang-orang yang memang sengaja dituju untuk menerima pesan yang ingin di sampaikan pihak pengirim pesan, maupun pihak-pihak lain yang kadang-kadang tidak ditunjukkan secara langsung untuk menerima pesan tersebut.

Komunikasi sebagai pengoperan ide dan gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi, menuju pencapaian tujuan bersama (kesamaan makna). Hal ini tidak mungkin untuk memiliki hubungan manusia tanpa komunikasi. Namun, komunikasi yang baik dan efektif diperlukan tidak hanya untuk hubungan manusia yang baik tetapi juga untuk bisnis yang baik dan sukses. Komunikasi efektif diperlukan di berbagai tingkat dan untuk berbagai aspek dalam organisasi. Sehingga dalam upaya penertiban kepada gelandangan dan pengemis oleh satuan polisi pamong praja perlu adanya sebuah teknik komunikasi yang harus dilakukan.

Teknik komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses atau upaya komunikasi dalam membangun atau membuat suatu rencana yang akan dilakukan nantinya, guna menciptakan sebuah kinerja yang baik. Hal ini adalah yang akan menjadi suatu ajuan bagi satuan polisi pamong praja dalam penertiban yang berguna untuk menjalin suatu komunikasi yang baik dengan gelandangan dan pengemis di Duri kecamatan bathin solapan. Bathin solapan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Duri, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Di Duri ini banyak terdapat gelandangan dan pengemis baik itu di sekitaran lampu merah, pasar, mini market, masjid, rumah makan, rumah sakit. Ini menjadi perhatian karena banyak dari masyarakat yang merasa terganggu akan kehadiran gelandangan dan pengemis. Ini tentu menghimbau polisi pamong praja untuk turun ke lokasi menertibkan para

gelandangan dan pengemis.

Ketika menyebutkan kata “pengemis”, maka sebutan pengemis tidak terlepas dari sebutan “gepeng”. Istilah gepeng (gelandangan dan pengemis) bagaikan dua tali yang saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan PP Nomor. 31 Tahun 1980, gelandangan didefinisikan sebagai orang –orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara ditempat umum.mereka meninggalkan tempat asalnya, pedesaan, penghuni tempat-tempat di kota-kota, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah atau wilayah lain, mereka termasuk golongan manusia tuna karya dan tuna wisma (homeless).

Menurut Fariyah (2019:3) berbeda halnya dengan pengemis, adalah sebutan orang yang membutuhkan uang, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plasti, bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karna lapangan kerja yang sempit.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai pedoman tugas kerja salah satunya dalam Penertiban gelandangan dan pengemis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 148 dan 149 Tahun 2004 diamanatkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam

penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu urusan wajib yang di serahkan kepada daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sifat arogan dalam melakukan penertiban dan sebagian masyarakat lagi mengetahui jika penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki SOP didalamnya.

Banyak tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan ketentraman pada masyarakat, salah satunya dengan menertibkan gelandangan dan pengemis. Penertiban ini tidak didasari dengan perbuatan yang kasar melainkan dengan menggunakan etika dalam berkomunikasi.

Dalam berkomunikasi, terdapat etika yang harus dipahami. Etika komunikasi didalam organisasi misalnya mencakup tatanan moral dan standar-standar perilaku yang harus dipatuhi dalam membuat keputusan dan memecahkan berbagai permasalahan. Akan tetapi, untuk menentukan apa yang etis atau pantas dan tidak etis bukanlah hal mudah dilakukan bagi setiap organisasi. Oleh karena itu penting bagi organisasi untuk menjalankan kode etik secara wajar dan konsisnten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

juga dalam berkomunikasi adalah efek atau dampak yang ditimbulkan dari akibat proses komunikasi tersebut, untuk sebab itulah ada etika yang harus dipahami agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam berkomunikasi.

Kesalahpahaman terjadi akibat kurang beradaptasi dengan cepat. Nilai-nilai yang membentuk etika harus di pahami dengan benar karena sebenarnya semua komunikasi yang di lakukan menggunakan nilai-nilai etika di dalamnya, setiap bentuk komunikasi selalu menggunakan etika walaupun dalam kadarnya masing-masing sesuai konteks, dan situasi yang ada.

Komunikasi akan berjalan dengan lancar apabila menggunakan etika di dalamnya, seperti saling menghargai, saling menghormati, dan apabila lawan bicara lebih tua maka haruslah di hormati, karna orang yang lebih di hormati dan di hargai adalah orang yang memiliki etika dan sopan santun.

Menurut Mufid (2009:128) tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, betapa pun unggulnya seseorang, kesuksesan tidak akan pernah diperoleh tanpa penguasaan keterampilan komunikasi yang efektif.

Wibur Scramm dalam Mufid (2009:128) menyebutkan sebagai “the conditions of succes in communication”, yakni kondisi yang harus dipenuhi jika kita ingin agar pesan yang kita sampaikan menghasilkan tanggapan yang kita ingin kan.

Mufid (2009:174) Etika komunikasi adalah norma nilai, atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan berkomunikasi di suatu masyarakat. Ketika melakukan komunikasi tentu harus memperhatikan bagaimana etika yang di

berlakukan. Etika yang digunakan dalam penelitian ini adalah etika sosial karena etika ini membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain. Baik dalam lingkup terkecil, keluarga, hingga yang terbesar bernegara.

Begitu juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang harus menggunakan etika dalam berkomunikasi agar komunikasi yang dilakukan oleh petugas dapat diterima oleh gelandangan dan pengemis dan di mengerti itulah komunikasi yang efektif dimana kita menyampaikan pesan dan dapat diterima dengan baik.

Berkaitan dengan etika komunikasi polisi pamong praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis yaitu susahnya para Gelandangan dan Pengemis untuk ditertibkan meski sudah dilakukan penertiban di lokasi tetapi tetap saja terulang kembali. Polisi Pamong Praja terus mencari cara agar komunikasi yang dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis dapat berhasil sehingga Gelandangan dan Pengemis tidak mengulanginya kembali. Karena kehadiran Gelandangan dan Pengemis tersebut sangat mengganggu ketentraman masyarakat yang membuat mereka terpaksa untuk memberi. Dalam sehari Gelandangan dan Pengemis tersebut mampu meraup keuntungan hingga ratusan ribu terkadang Gelandangan dan Pengemis tersebut kita tidak mengetahui identitasnya, apakah mereka berasal dari kota lain maupun mereka orang yang mampu dan mereka pun memiliki banyak cara agar terlihat seperti orang yang sangat membutuhkan bahkan tipuan-tipuan juga mereka lakukan demi kelancaran mereka untuk meminta-minta

seperti menyembunyikan salah satu bagian tubuhnya seperti, tangan atau kaki dengan cara melipatnya agar terlihat seperti orang cacat.

Jika komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak menggunakan etika didalamnya maka dari Gelandangan dan Pengemis sendiri pun tidak akan ada rasa menghargai bahkan bisa jadi gelandangan dan pengemis akan melawan dan mengulangi kembali aktivitas yang mereka biasa lakukan.

Seperti pengamatan yang saya lakukan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penertiban tetapi masih banyak juga gelandangan dan pengemis yang mengulangi kembali kegiatannya, dan dari pengamatan saya Satuan Polisi Pamong Praja sebelum melakukan tindakan mereka terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada gelandangan dan pengemis, bentuk etika komunikasi seperti apa yang dapat dipahami oleh para Gelandangan dan Pengemis tersebut.

Aktivitas yang dilakukan gelandangan dan pengemis sangat mencoreng wajah berbagai wilayah termasuk di wilayah Duri. Melihat kondisi seperti ini Gelandangan dan Pengemis telah banyak menggunakan berbagai macam modus demi untuk mendapatkan uluran tanan masyarakat di sekelilingnya, mulai dari meminta-minta, mengulurkan tangan, bahkan mereka berani mengatas namakan mushola, pesantren dan sebagainya untuk kepentingan mereka. Hal ini tetntu saja berpengaruh terhadap Gelandangan Dan Pengemis karna posisi nya disini mereka tersebut jelas dipengaruhi oleh ekonomi mereka yang rendah yang membuat mereka terus menerus

melakukan aktivitasnya yaitu meminta-minta. Maraknya gelandangan di wilayah Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis tentu menunjukkan tingkat kemiskinan wilayah. Namun hakekatnya masalah mereka bukan hanya kemiskinan belaka, melainkan juga eksploitasi dan manipulasi. Keberadaan para Gelandangan dan Pengemis di wilayah Duri bukanlah berasal dari Duri melainkan berasal dari luar kota atau wilayah lainnya bahkan dari luar provinsi Riau.

Penanganan gelandangan dan pengemis tentunya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Bahwa Gelandangan dan Pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial masyarakat yang di sebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan yang perlu segera dilakukan segera penanganannya secara efektif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai kalangan baik di masyarakat maupun pemerintah Duri secara umum pada perkembangan hal ini merupakan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja yang ditekankan pada pelayanan masyarakat, salah satunya tugas Polisi Pamong Praja adalah pembinaan, ketentraman dan ketertiban serta berfungsi sebagai penegakan peraturan Daerah.

Penertiban terhadap gelandangan dan pengemis biasanya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja saja, tanpa di sertai oleh Dinas sosial setempat. penyidik pegawai negeri sipil yang bekerja sama dengan warga sekitar. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antara lintas instansi dengan melakukan razia di tempat-tempat umum di mana mereka biasanya melakukan aktivitas nya secara periodik.

Disinilah peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi yang melakukan yang melakukan pengangan terhadap lingkup sipil di tingkat Daerah menjadi penting. Satuan Polisi Pamong Praja adalah pihak yang terlibat secara langsung dan upaya penertiban dan penanganan gelandangan dan pengemis sebagai upaya untuk wilayah sebagai tempat tinggal yang layak untuk semua masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja berpegang pada kaidah hukum, baik yang berkaitan dengan lingkup undang-undang nasional maupun yang bersifat regional.

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendetail tentang Etika komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis Karena kenyamanan di wilayah tersebut terganggu akibat adanya Gelandangan dan Pengemis yang meresahkan masyarakat sehingga Satuan Polisi Pamong Praja terus melakukan penertiban gelandangan dan pengemis tersebut. Nah, disini saya juga ingin mengubah persepsi masyarakat mengenai Satuan Polisi Pamong Praja melalui Gelandangan dan Pengemis yang mana dalam pandangan masyarakat penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja itu dilakukan dengan cara kekerasan dan tidak sesuai dengan tatanan moral. untuk itu peneliti bermaksud mendeskripsikan dan mendokumentasikan kedalam bentuk penulisan ilmiah dengan mengangkat objek penelitian dengan judul **“Etika Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis”**.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian. Sebagai bentuk dorongan dari suatu kegiatan dari penelitian untuk menjadi penyebab suatu kegiatan penelitian terjadi untuk di lakukan. Jadi dari latar belakang diatas dapat di simpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja kurang berpengaruh terhadap gelandangan dan pengemis.
2. Kekerasan yang biasa di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertipkan Gelandangan dan Pengemis.
3. Kenyamanan masyarakat terganggu karna adanya gelandangan dan pengemis.
4. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertipkan Gelandangan dan Pengemis.
5. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja menindak Gelandangan Dan Pengemis berdasarkan perbedaan ekonomi mereka yang rendah.

## C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada Etika Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertipkan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Etika Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis” dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana etika komunikasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan**

Setiap penelitian pasti ada tujuan, hal ini perlu diperhatikan agar bisa menjadi acuan bagi setiap kegiatan yang akan di lakukan karena tujuan penelitian merupakan elaborasi dari kegiatan penelitian tersebut, maka dari itu tujuan penelitian ini, sebagai berikut : Untuk mengetahui etika komunikasi yang di gunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis .

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian informasi dan kajian ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan juga dapat menambah kajian literature sebagai sumber penulisan ilmu komunikasi khususnya

dibidang etika komunikasi satuan polisi pamong praja.

**b. Manfaat praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pemerintah setempat untuk memaksimalkan program-program yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di wilayah Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis khususnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
3. Penelitian ini diharapkan mampu meminimalisir bahkan meniadakan gelandangan dan pengemis di daerah Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, guna memberikan suatu kenyamanan tanpa adanya gelandangan dan pengemis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KAJIAN LITERATUR

##### 1. Etika

Etika memiliki keterkaitan dengan moral dan tingkah laku. Etika sering disebut dengan filsafat moral. Etika merupakan ilmu yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya, etika membahas baik buruk benar atau tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak.

Menurut Mufid (2009:173) Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai yang mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Maka etika dapat di artikan sebagai nilai-nilai atau norma yang di jadikan pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Menurut Rosanti (2019:9) Etika merupakan ilmu yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya, etika membahas baik buruknya atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak.

Mufid (2009:174) Etika komunikasi adalah norma nilai, atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan berkomunikasi di suatu masyarakat. Ketika melakukan komunikasi tentu harus memperhatikan bagaimana etika yang di berlakukan. Etika yang digunakan dalam penelitian ini adalah etika sosial karena etika ini membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain. Baik dalam lingkup terkecil, keluarga, hingga yang terbesar bernegara.

Sifat dasar etika adalah sifat krisis, karenanya etika bertugas Darji dan Sidarta (2004:263) :

- 1) Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang di tuntutan oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku.
- 2) Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pernyataan krisis dengan sendirinya akan kehilangan hak nya.
- 3) Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus di taati.
- 4) Etika memberikan bekal bekal kepada manusia untuk mengambil sikap rasional terhadap semua norma.

- 5) Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada.

## 2. Komunikasi

Menurut Susatyo (2014:77) Komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata *communicare*, yang berarti sama. Jadi, kita akan mengadakan komunikasi dengan pihak lain, maka kita harus menentukan terlebih dahulu suatu sasaran untuk memperoleh pengertian bersama. Komunikasi adalah suatu proses penyampain dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Suatu komunikasi yang tepat akan terjadi apabila penyampai berita meyampaikan secara tepat sebuah informasi kepada penerima dan tidak terjadi gangguan atau distrosi.

Menurut Susatyo (2014:78) Komunikasi adalah proses kegiatan-kegiatan penyampaian berita yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lainn, dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Definisi ini memberi pengertian yang luas karena tidak hanya menitik bseratkan pada segi manusianya saja.

Menurut Mufid (2009:84) tujuan komunikasi terdiri dari soal mengubah sikap, opini, prilaku, masyarakat, dan lainnya. Sementara itu, fungsi komunikasi adalah menginformasikan, mendidik, mempengaruhi.

### 3. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai pedoman tugas kerja salah satunya dalam penertiban Gelandangan dan Pengemis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 148 dan 149 Tahun 2004 diamanatkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam penegakan peraturan Daerah (PERDA) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu urusan wajib yang di serahkan kepada daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Desthiani (2019:241) Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebuah perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menunjang peraturan daerah.
- b) Mengatur ketertiban umum.
- c) Mengantur kedamaian dan ketentraman publik.
- d) Pelindung masyarakat.

Dalam melakukan tugas-tugas diatas, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa fungsi berikut ini:

- 1) Persiapan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan atau keputusan walikota, pelaksanaan ketertiban umum dan perdamaian rakyat serta perlindungan masyarakat.

- 2) Implementasi peraturan dan regulasi daerah atau keputusan walikota.
- 3) Implementasi kebijakan tentang pelaksanaan ketertiban umum dan keselamatan orang-orang di daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penerapan peraturan daerah dan regulasi atau keputusan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan kedamaian masyarakat dengan kepolisian Republik Indonesia, penyidik, pegawai negeri dan aparatur lain.
- 6) Pengawasan masyarakat, aparat, atau badan hukum untuk mematuhi dan mentaati penegakan peraturan dan regulasi daerah atau keputusan walikota.
- 7) Implementasi tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Selain memiliki tugas dan fungsi, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengambil tindakan kontrol non-yudisial terhadap anggota masyarakat, aparat atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah atau peraturan yang dibuat oleh walikota.
- 2) Bertindak melawan warga negara, aparat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan kedamaian masyarakat.
- 3) Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas untuk menjalankan perlindungan masyarakat.

- 4) Melakukan tindakan investigasi terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum siapa yang diduga melanggar peraturan daerah atau keputusan walikota.
- 5) Melakukan tindakan administratif terhadap penduduk, komunita, aparat, atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah atau keputusan walikota.

#### 4. Etika Komunikasi

Mufid (2009:174) Etika komunikasi adalah norma nilai, atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan berkomunikasi di suatu masyarakat. Ketika melakukan komunikasi tentu harus memperhatikan bagaimana etika yang di berlakukan. Etika yang digunakan dalam penelitian ini adalah etika sosial karena etika ini membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain. Baik dalam lingkup terkecil, keluarga, hingga yang terbesar bernegara. Etika komunikasi perlu diperhatikan agar tidak terjadi suatu prasangka buruk yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap orang lain. Contohnya, setiap siswa tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar yang bisa membuat perasaan orang lain menjadi tersinggung. Dengan demikian etika komunikasi memegang peranan penting dalam pendidikan.

Jenis suasana keetikaan yang ada dalam suatu kelompok mempengaruhi pertentangan etika apa yang dipertimbangkan, proses untuk menyelesaikan konflik, dan karakteristik penyelesaiannya. Sejumlah elemen dikemukakan bahwa, secara bersama-sama, akan meningkatkan

pengembangan suasana keetikaan yang sehat dan bersemangat.

Ada beberapa hal pokok yang mana kita selaku komunikator perlu lakukan dan perlu aplikasikan dalam kehidupan, antara lain :

- a) Fokus pada lawan bicara
- b) Fokus pada masalah
- c) Jangan menimpali pembicaraan.
- d) Saling menghargai
- e) Selingi dengan Humor

#### A. **Komunikasi efektif**

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa non verbal secara baik.

Proses komunikasi akan efektif apabila komunikator melakukan perannya, sehingga terjadinya suatu proses komunikasi yang baik dan sesuai dengan harapan, dimana gagasan-gagasan atau ide dibahas dalam suatu musyawarah antara komunikator dengan komunikan, dan terjadi pemahaman tentang informasi atau segala sesuatu hal menjadi pokok dari pembahasan untuk mengarah pada kesepakatan dan kesatuan dalam pendapat.

Adapun komunikasi efektif mempunyai dasar sebagai berikut :

- a. Niat menyangkut: apa yang akan disampaikan, siapa sasarannya, apa

yang akan dicapai

- b. Minat, ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu:

Faktor objektif : merupakan rangsangan yang kita terima.

Faktor subjektif : merupakan faktor yang menyangkut diri si penerima stimulus.

- c. Pandangan, merupakan makna dari informasi yang disampaikan pada sasaran, menafsirkan informasi yang diterima tergantung pada pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan kerangka pikir seseorang.
- d. Lekat, merupakan informasi yang disimpan oleh si penerima. Libat, merupakan keterlibatan panca indra sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik komunikasi yang efektif yaitu teknik pertama komunikasi persuasif, yang bertujuan bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang lebih menekan sisi psikologis komunikan. Penekanan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, tetapi persuasi dilakukan dengan halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang.

Teknik kedua yaitu komunikasi bersifat perintah, Komunikasi instruktif atau koersi teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sangsi dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran (komunikan) melakukannya secara terpaksa, biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat fear arousing, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk. Serta tidak luput dari sifat red-

herring, yaitu interes atau muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik ,perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadikan untuk menyerang lawan. Bagi seorang diplomat atau tokoh politik teknik tersebut menjadi senjata andalan dan sangat penting untuk mempertahankan diri atau menyerang secara diplomatis.

Teknik terakhir yaitu hubungan manusiawi yang merupakan terjemahan dari human relation. Adapula yang mengartikan hubungan manusia dan hubungan antar manusia, namun dalam kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja, namun didalam pelaksanaannya terkandung nilai nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Seperti halnya mengubah sifat, pendapat, atau perilaku seseorang. Jika ditinjau dari sisi ilmu komunikasi hubungan manusia ini termasuk kedalam komunikasi interpersonal, pasalnya komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih dan bersifat dialogis. Hubungan manusia pada umumnya dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian dan mengembangkan tabiat manusia. Untuk melakukan hubungan manusia biasanya digunakan beberapa teknik pendekatan yaitu pendekatan emosional (emosional approach) dan pendekatan social budaya (sociocultur approach).

Komunikasi dikatakan efektif jika informasi, pemikiran, atau pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik sehingga menciptakan kesamaan persepsi, mengubah prilaku, atau mendapatkan

informasi (menjadi tahu/paham). Adapun komponen komunikasi yang efektif yaitu : Encoding, Decoding, Konteks (Context), Bahasa Tubuh (Body Language), Gangguan/Hambatan (Interference), Pikiran Terbuka (Be Open-minded), Mendengar Aktif (Active Listening), dan Refleksi (Reflection).

#### **5. Gelandangan dan Pengemis (gepeng)**

Menurut Huda (2009:29) Pengemis kebanyakan adalah orang yang hidup mengelandang. Istilah gelandangan artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan oeruntungannya dikota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai uang modal. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.

Menurut Ivana, Sugandi, Sarwo (2018:655) gelandangan dan pengemis (Gepeng), Gelandangan adalah seseorang yang hidup mengelandang sekaligus mengemis. Sedangkan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Menurut Suud (2008:8) Gelandangan dan Pengemis pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori mengelandang dan mengemis karena mala dalam bekerja. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui

dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas.

## **6. Menertibkan**

Menurut Nugroho Adi (2019:64) Menertibkan atau penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Peraturan nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai keseragaman pengertian dalam pengolahan dan analisis data. Penggunaan definisi ini di harapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menjelaskan istilah yang di ginakan untuk memudahkan serta memahami dan menyamakan persepsi terhadap konsep-konsep ataupun definisi-definisi yang digunakan. Definisi operasional dijabarkan dalam beberapa variabel berikut:

#### **1. Etika Komunikasi**

Etika Komunikasi merupakan prilaku yang sangat berpengaruh dalam berintraksi kepada makhluk soial lain dengan memperhatikan norma, nilai, atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan berkomunikasi di suatu masyarakat ataupun organisasi.

#### **2. Komunikasi Efektif**

Komunikasi efektif adalah suatu prosespenyampaianpesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik (feedback) atau reaksi sehingga pesan pun berhasil tersampaikan.

### 3. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang mana tugasnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman suatu daerah, tugas nya pun sudah di atur dalam perda setempat untuk menegakkan peraturan daerah tersebut.

### 4. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) merupakan kepanjangan dari gelandangan dan pengemis, Gelandangan dan Pengemis adalah suatu aktivitas di mana seseorang mendapatkan penghasilan dengan cara memintaminta dan berakibat meresahkan masyarakat setempat, Gelandangan dan Pengemis biasanya seseorang yang tidak berada pada daerah tersebut melainkan dari daerah lain.

### 5. Menertibkan

Menertibkan adalah memberi arahan atau mengamankan sesuai dengan aturan yang telah di tentukan.

### C. Penelitian Terdahulu yang relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak plagiatisme secara utuh hasil karya orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya

adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian itu adalah sebagai berikut:

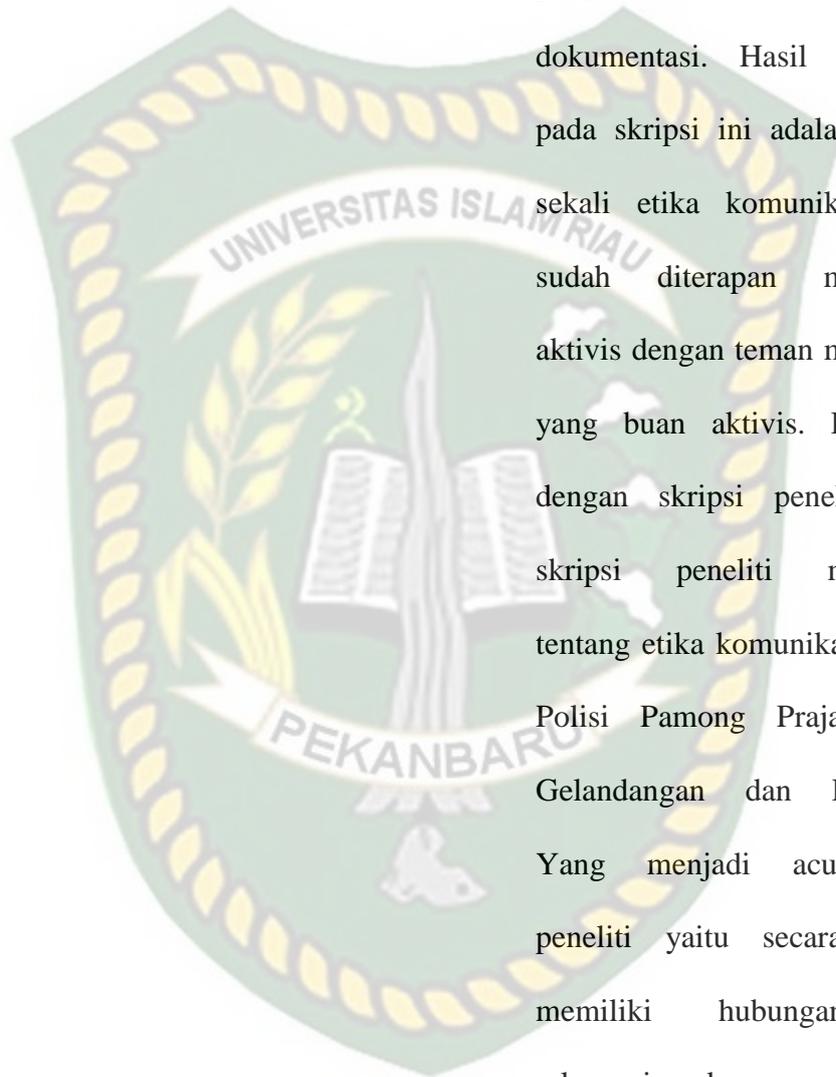
**Tabel 2.1 . Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Dwi Rosanti (2019)	Etika Komunikasi Mahasiswa Aktivistis Kampus Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	<p>pokok permasalahan yang di angkat dalam penelitian yaitu :a. Bagaimana etika komunikasi mahasiswa aktivis unit kegiatan mahasiswa (UKM) dengan teman selain aktivis di UIN Sunan Ampel Surabaya.</p> <p>b. Bagaimana etika komunikasi mahasiswa aktivis Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan dosen di UIN sunan Ampel Surabaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data</p>

---

menggunakan wawancara secara mendalam, studi pustaka, pengamatan terlibat, dokumentasi. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah banyak sekali etika komunikasi yang sudah diterapkan mahasiswa aktivis dengan teman mahasiswa yang bukan aktivis. Perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu skripsi peneliti membahas tentang etika komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja kepada Gelandangan dan Pengemis, Yang menjadi acuan bagi peneliti yaitu secara teoritis memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian peneliti dan secara konseptual dapat dijadikan acuan teori umum bagi peneliti dalam melakukan penulisan skripsi.

---



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

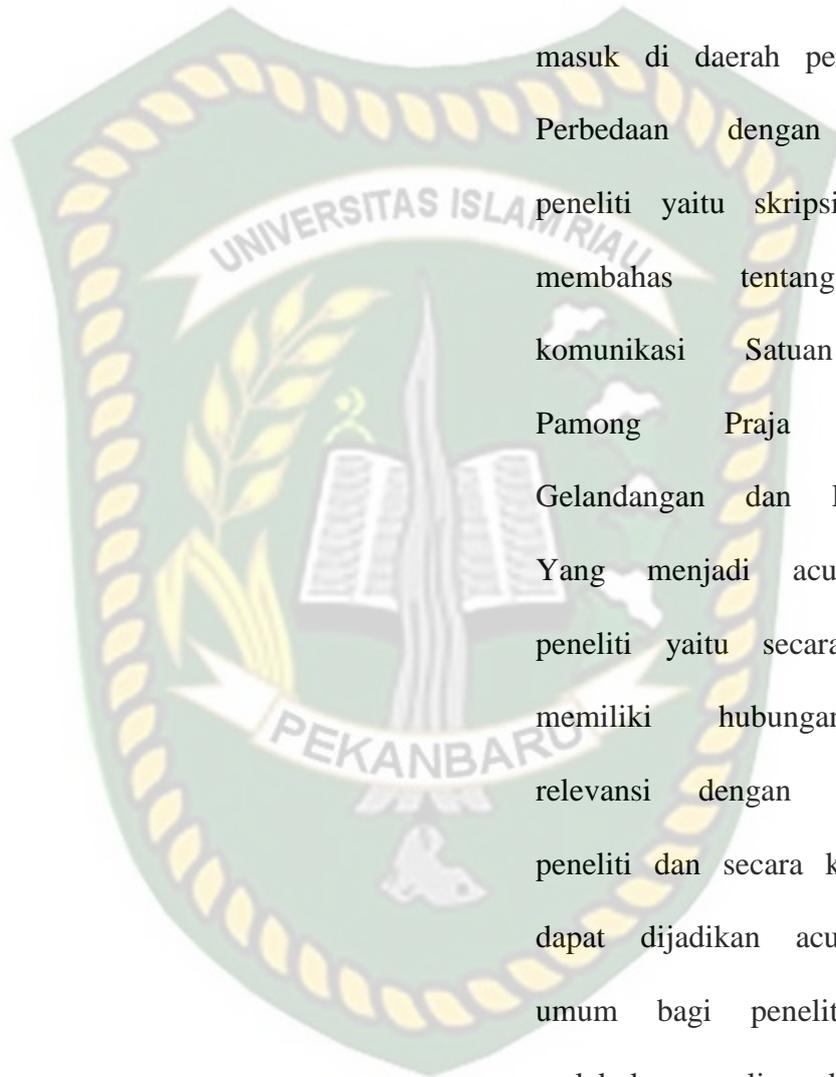
Perpustakaan Universitas Islam Riau

2

Ita Fariyah  
(2019)

peranan polisi  
 pamong praja  
 Dalam  
 Menanggulangi  
 Gelandangan  
 Dan Pengemis  
 (Gepeng) Yang  
 Mengganggu  
 Ketertiban  
 Umum Di  
 Palembang

pokok permasalahan yang diangkat : 1. Bagaimana etika pedagang kaki lima (PKL) (Studi Kasus Ibu Asnia Dan Pembelinya, Di Warung Taman Puri Jl. Bunghatta, Taman Kota Wilayah Mataram)? 2. Bagaimana dampak komunikasi dari etika komunikasi pedagang kaki lima (PKL) (Studi Kasus Ibu Asnia Dan Pembelinya, Di Warung Taman Puri Jl. Bunghatta, Taman Kota Wilayah Mataram)? . metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu berbagai upaya telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Palembang untuk mengatasi



masalah gelandangan dan pengemis namun mereka tetap saja berkeliaran bahkan nekat masuk di daerah perkuliahan. Perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu skripsi peneliti membahas tentang etika komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja kepada Gelandangan dan Pengemis. Yang menjadi acuan bagi peneliti yaitu secara teoritis memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian peneliti dan secara konseptual dapat dijadikan acuan teori umum bagi peneliti dalam melakukan penulisan skripsi.

3	Ulul Azmi (2017)	Etika komunikasi pedagang kaki lima ( pkl )	pokok permasalahan yang diangkat : 1. Bagaimana etika pedagang kaki lima (PKL) (Studi Kasus Ibu Asnia Dan
---	------------------	---	---

---

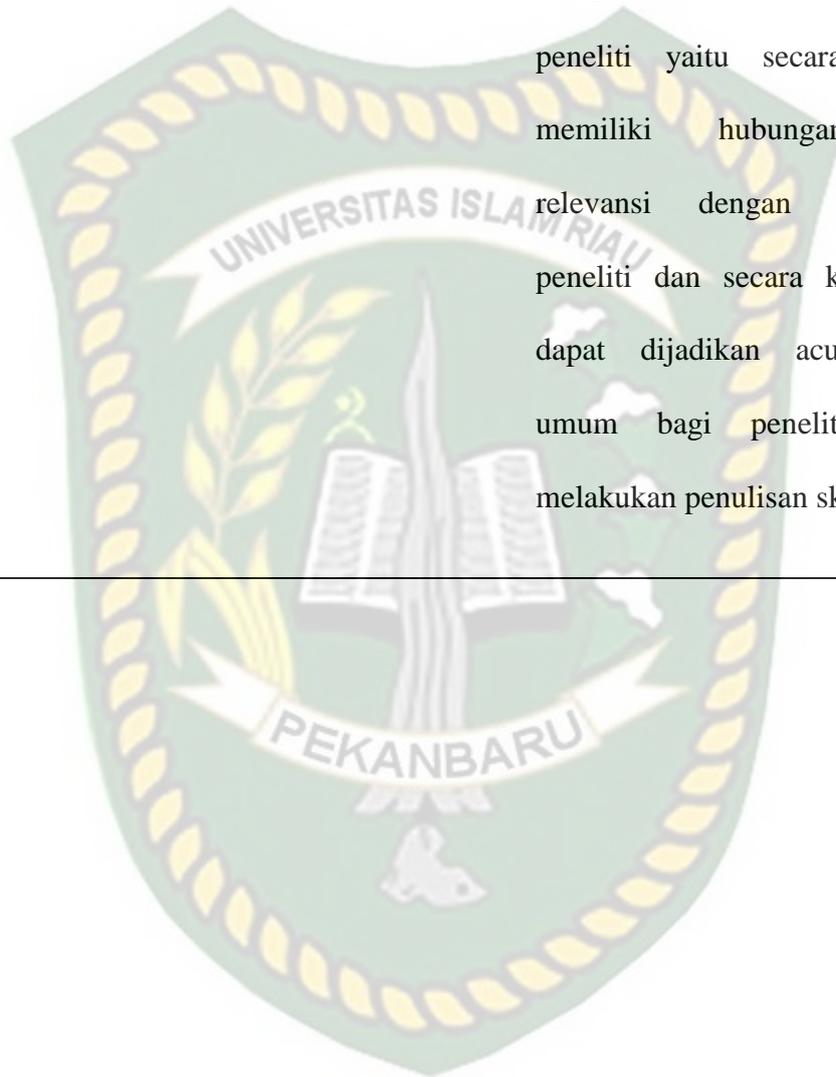
(studi kasus ibu pembelinya, Di Warung Taman asnia dan Puri Jl. Bunghatta, Taman Kota pembelinya, di Wilayah Mataram)? 2. warung taman Bagaimana dampak komunikasi puri jl. dari etika komunikasi pedagang Bunghatta, kaki lima (PKL) (Studi Kasus taman kota Ibu Asnia Dan Pembelinya, Di wilayah Warung Taman Puri Jl. mataram) Bunghatta, Taman Kota Wilayah Mataram)? . metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu terdapatnya perbedaan dalam penggunaan bahasa sehari-hari yaitu antara senior, junior dan teman sebaya. Perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu skripsi peneliti membahas tentang etika komunikasi Satuan Polisi

---

---

Pamong Praja kepada Gelandangan dan Pengemis. Yang menjadi acuan bagi peneliti yaitu secara teoritis memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian peneliti dan secara konseptual dapat dijadikan acuan teori umum bagi peneliti dalam melakukan penulisan skripsi.

---



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) metodologi penelitian merupakan “ cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara Ilmiah berarti kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal. Sistematis artiya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Menurut Iskandar (2008:191-192) penelitian ilmiah pada dasarnya menggabungkan berfikir rasional, sistematis dan empiris, artinya penelitian yang dirumuskan di satu pihak dapat diterima dengan akal sehat, kemudian penelitian dilaksanakan secara systemic, teratur, serta penelitian tersebut dapat dibuktikan melalui data dan fakta secara empiris. Dalam melakukan penelitian kualitatif, waktu pengumpulan data, pada umumnya seorang

peneliti dapat menemukan data penelitian dalam bentuk kata-kata, gambar, data disini bermaksud adalah transkrip-transkrip wawancara, catatan dan lapangan, dokumen pribadi, foto-foto, kamera, nota dan lain-lainnya. Data-data penelitian tersebut haruslah dideskripsikan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan data kualitatif, yaitu peneliti dilakukan dengan cara pendekatan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat. Metode ini dipakai untuk memecahkan masalah atau mendapat jawaban dalam penelitian ini yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, klasifikasi analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dengan tujuan utama membuat gambaran dengan keadaan suatu subjek dalam suatu deskripsi situasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan, bahwa penelitian deskriptif analisis berdasarkan data kualitatif yaitu penelitian yang perlu mengamati, meninjau dan mengumpulkan informasi, serta menggambarkan secara tepat permasalahan yang ada, dengan langsung dapat memahami dan menyelidiki lebih dalam lagi mengenai suatu masalah.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Sugiyono (2017:215) menyatakan penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*),

pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut aktivitasnya, atau orang-orang yang di sudut jalan yang sedang ngobrol, dapat dikatakan sebagai objek penelitian yang ingin di ketahui “ apa yang terjadi” di dalamnya.

Subjek penelitian ini digunakan untuk melengkapi hasil-hasil dari berbagai data dan mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Riau. Subjek ataupun pelaku merupakan orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini, orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu : 2 orang gelandangan dan pengemis, 1 komandan Satuan Polisi Pamong Praja dari Kecamatan Bathin Solapan 1 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja, 2 orang masyarakat sekitar. Adapun indikator pemilihan subjek sebagai berikut :

1. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bathin Solapan

Komandan yang masih aktif melakukan penertiban, dan ikut serta dalam setiap pelaksanaan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

2. Gelandangan dan Pengemis

Yang aktif melakukan aktivitasnya yaitu mengelandang dan mengemis, berada di tempat-tempat vital yang menjadi tempat sasaran penertiban di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis. Tepatnya di sekitaran lampu merah Geroga, perwakilan dari Gelandangan dan Pengemis sendiri.

### 3. Masyarakat Sekitar

Terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah yang dilakukan nya penertiban dan menyaksikan langsung penertiban tersebut yakni sekitaran lampu merah Geroga, Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

Menurut Bungin (2010:107) Informan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh. Prosedur purfosif adalah salah satu strategi yang paling umum di dalam penelitian kualitatif yaitu menentukan kelompok masyarakat yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2017:41) pengertian objek penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Objek penelitian yang diteliti adalah bagaimana etika Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Menurut Subagyo ( 2015:35 ) bahwa lokasi penelitian adalah suatu areal dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburan dengan kejelasan daerah atau wilayah tertentu, misalnya pulau jawa, jakarta, instansi pemerintah dan sebagainya. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang di ambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa lokasi penelitian merupakan suatu tempat dalam memperoleh atau mendapat data-data yang di perlukan sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir.

Lokasi penelitian ini dilakukan di lampu merah baik itu di jalan besar Geroga maupun Hangtuh Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah, peneliti ingin mengetahui aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di sepanjang lampu merah jalan besar Geroga maupun Hangtuh Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, selain itu lokasi ini juga tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, medah di jangkau, dan tidak menggunakan waktu yang banyak.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 27 Agustus 2020 dan tanggal 1 dan 2 September 2020 di sekitaran lampu merah Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 3.3**

**Rencana Waktu Penelitian**

N O	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																			
		September				Desember				Februari				Juni				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal dan bimbingan	x	x	X	X	X	X	X													
2	Seminar proposal								X												
3	Revisi									X	X										
4	Riset lapangan											X	X	X	X	X	X				
5	Konsultasi bimbingan skripsi																	X			
6	Ujian komprehensif																			X	
7	Revisi																			X	
8	Pengesahan skripsi																				X
9	Pengadaan serta penyerahan skripsi																				X

#### **D. Sumber Data**

Jenis data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2017:225) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada narasumber ( komandan Satuan Polisi Pamong Praja, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Gelandangan dan Pengemis di Duri Kecamatan Bathin solapan Kabupaten Bengkalis). Yang di observasi adalah bagaimana etika Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis, bagaimana cara berkomunikasi dengan Gelandangan dan Pengemis agar dapat di mengerti dan dapat membuat Gelandangan dan Pengemis tidak melakukan kegiatan yang biasa mereka lakukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informasi peneliti dari hasil wawancara berjumlah 6 orang, yaitu : 2 orang Gelandangan dan Pengemis, 1 komandan Satuan Polisi Pamong Praja, 1 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan 2 orang masyarakat sekitar.

##### **2. Data Sekunder**

Sugiyono (2017:225) data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai

sumber, jenis data ini dapat juga di gali dari monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga, laporan-laporan, buku-buku, dan lain-lain.

Jadi data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber tertulis yang dapat mendukung kebenaran penelitian. Didalam meneliti. Dalam data sekunder ini peneliti menggunakan buku-buku penunjang yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan etika, jurnal-jurnal, artikel, dan juga skripsi-skripsi serta studi dokumentasi yaitu : pengambilan video dan beberapa foto baik itu dalam penertiban ataupun wawancara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017:224) Teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dala penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yan memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi syarat data bila tidak ada dilapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan data yang diteliti peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

##### **1. Observasi**

Nasution (dalam sugiyono,2017:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja brdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Menurut Subagyo (2015:65) cara pelaksanaan kegiatan observasi dan tujuan dilakukannya observasi, dapat dibedakan kedalam dua bentuk :

- a. Observasi partisipan (pengamatan terlibat)
- b. Observasi non partisipan (pengamatan tidak terlibat)

Perbedaan tersebut juga dilakukan untuk melihat sejauh mana keterlibatan observer tersebut pada objeknya, selain itu terletak pada ketajaman atas objeknya. Berdasarkan penelitian ini. Peneliti mengambil jenis teknik observasi non partisipan, karena penulis hanya bersifat mengamati dan menyaksikan secara langsung pada objek yang diteliti. Pada teknik observasi ini penelitian melakukan observasi dengan mengamati langsung penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

## 2. Wawancara

Menurut Subagyo (2015:39) salah satu metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukannya untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antarinterviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

Sugiyono (2017:233) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh

karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur dengan memberikan pertanyaan yang terkonsep dan telah disiapkan sebelumnya sehingga proses wawancara akan berjalan dengan baik, dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis, dan juga rekaman handphone dengan mewawancarai komandan Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penertiban.

Apa yang disiapkan dengan teknik wawancara ini diharapkan dapat memperoleh informasi serta keterangan yang sangat jelas bagi peneliti agar dapat mengetahui tentang mengenai penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini peneliti berdialog atau bertanya secara langsung kepada narasumber tentang bagaimana etika Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan setiap kali melakukan penertiban sesuai dengan SOP ( standar oprasional prosedur ) Kabupaten Bengkalis.

### 3. Dokumentasi

Sugiyono (2017:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama. Teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh data dari foto-foto dan video kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan dan dikantor.

#### F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:270) Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility (validitas internal)*, *transferability (validitas eksternal)*, *dependability (reliability)*, dan *confirmability (obyektifitas)*.

##### 1. Uji Credibility (*validitas internal*)

Menurut Moloeng (2011:324) Penerapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian

rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai : kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Meurut Sugiyono (2014:270) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain di lakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan penekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, membercheck.

2. *Transferability (validasi eksternal)*

Menurut Moloeng (2011:324) Kriteria ini berbeda dengan validasi eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3. *Dependability (reliabilitas)*

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepresiannya.

#### 4. *Confirmability (obyektifitas)*

Uji obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian di sepakati banyak orang atau tidak. Penelitian di dikatakan obyektif jika di sepakati banyak orang.

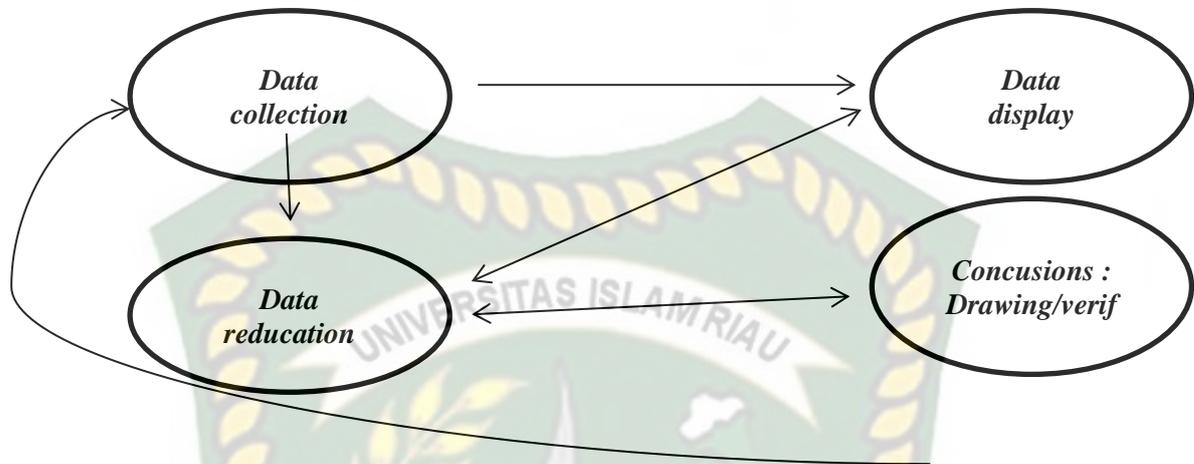
Disini peneliti menggunakan teknik Triangulasi karna peneliti menggunakan gabungan dari observasi non partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak, guna untuk mengetahui data yang di peroleh secara lebih luas, konsisten, dan pasti.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

Menurut Sugiyono (2017:245) analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Komponen dalam analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas rangkaian kegiatan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1



### Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

#### 1. Reduksi Data

Sugiyono (2017:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan focus permasalahan pada penelitian. Observasi berkelanjutan yang dilakukan peneliti serta wawancara tidak terstruktur menghasilkan data-data yang tidak relevan, diantaranya fakta-fakta mengenai para informan yang tidak berhubungan dengan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Gelandangan dan Pengemis di Duri Kecamatan Bathin Solpan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data berfungsi untuk membantu peneliti memahami apa yang terjadi sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut atas pemahaman tersebut. Bentuk penyajian yang paling umum dalam data kualitatif adalah teks naratif. Namun bentuk sajian data yang sedemikian rupa membuat terlalu banyak informasi, sifatnya terlalu luas dan tidak beraturan sehingga menyulitkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2017:249) dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa, grafik, matriks, *network* (jaringan kerja), dan *chart*. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Display atau penyajian data pada penelitian ini diarahkan kedalam pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang etika Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban kepada Gelandangan dan Pengemis.

### **3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi**

Sugiyono (2017:252-253) Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih reamang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau teori. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan tentang Etika Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti menggunakan analisis data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi. Data-data terkumpul dan kemudian dianalisis. Data-data yang menyangkut tentang Etika Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Duri Kecamatan Bathin solapan Kabupaten Bengkalis hasil wawancara dianalisis dan disesuaikan dengan hasil observasi. Data tentang tentang Etika Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Duri Kecamatan Bathin solapan Kabupaten Bengkalis dideskripsikan dengan jelas sesuai dengan data yang didapat dilapangan untuk dijadikan sebuah hasil penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat dengan Satpol PP, merupakan perangkat pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950 dengan semboyan praja wibawa, untuk ikut membantu sebagian tugas pemerintah Daerah. Sebenarnya tugas ini sudah dilaksanakan sejak zaman kolonial. Sebelum terbentuk Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen sebagai penjaga keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat di Daerah Istimew Yogyakarta untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkanlah sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi

Pamong Praja diluar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-pokok kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satuan Polisi Pamong Praja terkenal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

## **2. Detail Lokasi Daerah Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis**

Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis berada di jalan lintas sumatra, sekitar 130 km dari Kota Pekanbaru dalam perjalanan menuju sumatra utara. Kecamatan Bathin Solapan merupakan Kecamatan baru merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Mandau pada tahun 2017 Yang memiliki 13 Desa atau Kelurahan, yaitu:

1. Air Kulim
2. Balai Makam
3. Bathin Sobanga
4. Boncah Mahang
5. Buluh Manis
6. Bumbang
7. Kesumboampai
8. Pamesi
9. Pematang Obo

10. Petani
11. Sebangar
12. Simpang Padang
13. Tambusai Batang Dui

Yang memiliki batas-batas :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu dan Dumai.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.



3. **Bagan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis**

**Gambar 4.1**



**Struktur Bagan Satuan Polisi Pamong Praja**

Sumber : Data Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

#### **4. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis**

Adapun fungsi dan tujuan dari satuan polisi pamong praja tersebut di paparkan dalam visi dan misi. Langkah-langkah kedepan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan visi dan misinya. Hal ini dilakukan agar langkah-langkah tersebut tidak keluar dari visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga terciptanya tujuan akhir yang diinginkan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan bahwa visi dari Satuan Polisi Pamong Praja daerah Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut: “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah serta pelindung visi dan misi pemerintahan Kecamatan Bathin Solapan”.

Untuk mewujudkan visi yang diinginkan, misi yang harus dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja agar lebih efektif, handal, tangguh dan profesional.
- b. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjalin kerjasama untuk penguat koordinasi, pengawasan dan pengendalian.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas.

5. **Kegiatan Penertiban Gepeng Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis**

**Gambar 4.2**



**Kegiatan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis oleh Satpol PP**

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020

Gambar 4.3



Kegiatan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis oleh Satpol PP

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020

Gambar 4.4



Kegiatan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis oleh Satpol PP

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020

## B. Hasil Penelitian

Profil Informan atau Subjek Penelitian

Nama : Muhammad Nazrin

Umur : 45 tahun

Masa kerja : 20 tahun

Pekerjaan : Kasi Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan  
Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

Profil Informan atau Subjek Penelitian

Nama : Sandi Handoko

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Anggota Satpol PP Kecamatan

Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

Masa Kerja : 8 Tahun

Profil Informan atau Subjek Penelitian

Nama : Suhardi

Umur : 63 tahun

Asal : Sinaboi

Pekerjaan : Beraktivitas sehari-hari sebagai Gepeng.

Profil Informan atau Subjek Penelitian

Nama : Dartik

Umur : -

Asal : Jawa Tengah

Pekerjaan : Beraktivitas sehari-hari sebagai Gelandangan dan

Pengemis.

Profil Informan atau Subjek Penelitian

Nama : Tomi Ali

Umur : 27 Tahun

Asal : Duri

Pekerjaan : Bekerja sebagai wiraswasta

Profil Informan atau Subjek Penelitian

Nama : Ade

Umur : 25 Tahun

Asal : Duri

Pekerjaan : Wirausaha

### 1. **Etika Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis**

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan juga menegakkan peraturan Daerah yang mana dalam penelitian ini peneliti meneliti Etika Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang penuh dalam melakukan penertiban, berikut wawancara bersama Kasi Trantib Satuan Polisi Pamong Praja, ditingkat kecamatan kepala Satuan Polisi Pamong Praja di sebut Kasi Trantib.

Sebagai penegak peraturan daerah lembaga teknis yang berhadapan langsung dngan masyarakat khususnya pengemis dan juga dalam

melaksanakan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan, kepatuhan, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, maka tindakan dipolakan dalam tahapan-tahapan yakni tindakan yang terdiri dari pemberian penerangan, himbauan, dan pendekatan persuasif, apabila tindakan ini sudah dilakukan dan masih ditemukan pelanggaran maka pola tindakan berikutnya adalah dengan pola prefentif yang dilakukan baik dengan patroli, pengawasa, penjagaan atau penghaluan, pemeriksaan setempat, dan dengan teguran lisan atau tulisan. Apabila pola tindakan yang kedua telah dijalankan dan masih di temukan pelanggaran yang sama oleh gelandangan dan pengemis maka tindakan terakhir adalah dengan refresif yaitu dengan Yustis yaitu melakukan sidang pengadilan.

Pelaksanaan penertiban Gelandanga dan Pengemis yang dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis. Pernyataan ini disampaikan oleh Kasi Trantip Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Muhammad Nazrin 2 Februari 2021.

“Penertiban yang kami lakukan sesuai laporan dari masyarakat yang merasa tertanggung dan merasa resah dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh gepeng tersebut, selanjutnya surat perintah diturunkan oleh camat kemudian di serahkan kepada kasi trantib Satuan Polisi Pamong Praja, surat perintah tersebut di dasari oleh peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2011 tentang ketertiban umum, kami tidak bisa langsung menertibkan kalau tidak ada dasar peraturannya. Saya sebagai kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bathin Solapan saya berkewajiban membina anggota-anggota saya untuk selalu menjunjung tinggi norma-noroma, Dalam kegiatan penertiban Gelandangan dan Pengemis kami melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan dimana kami selalu mengedepankan humanisme dan tentunya menggunakan etika di dalamnya, saat penertiban dengan memberikan surat edaran terlebih dahulu jika diabaikan lanjut kami memberikan peringatan dan jika masih juga diabaikan kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja akan bertindak secara tegas”

Hal ini dapat di simpulkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mengedepankan sikap humanisme yang sudah menjadi prosedur dalam bertugas, karena sejatinya gelandangan dan pengemis juga sesama manusia.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kepala satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis Pada Tanggal 2 Februari 2021.

Wawancara dilanjutkan dengan Bapak Suhardi selaku Gelandangan dan Pengemis yang pernah di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 maret 2021, berikut wawancanya:

“Saya sudah pernah beberapa ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di lokasi yang sama, mereka tidak kasar dalam melakukan penertiban seperti memukul, menendang dan yang lain, saat penertiban kami di tangkap dan dikumpulkan terus kami di beri surat dan peringatan, setelah itu kami berhenti untuk mengemis dalam waktu beberapa saat.”

Dari keterangan pak suhardi selaku Gelandangan dan Pengemis terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertibannya tidak ada tindak kekerasan baik secara fisik maupun ucapan, disini dapat kita lihat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya sesuai SOP yang berlaku, pernyataan tersebut di sampaikan langsung oleh Bapak Suhardi selaku Gelandangan dan Pengemis Pada wawancara tanggal 3 Februari 2021.

Selanjutnya wawancara singkat bersama ibu Dartik selaku Gelandangan dan Pengemis yang berada disekitaran lampu merah Geroga Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis.

“Saya ditangkap oleh Satpol PP ketika saya sedang meminta-minta lalu saya di bawa kantor dan di beri peringatan. Mereka memberi peringatan dengan nada yang tinggi serta membentak-bentak”

Saat wawancara peneliti bersama ibuk Dartik peneliti tidak terlalu mengerti banyak apa yang disampaikan oleh ibu tersebut karena sudah agak ngaur dan banyak tidak mengerti dengan pertanyaan yang peneliti ajukan.

Jadi kesimpulan yang peneliti ambil saat wawancara tanggal 3 Februari 2021 tersebut, penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis dengan cara membentak-bentak.

Wawancara selanjutnya bersama Bapak Tomi ali selaku warga sekitar Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis, berikut hasil wawancaranya:

“Sepengetahuan saya para Satpol PP saat melakukan Penertiban Kepada para Gelandangan dan Pengemis sudah baik karena menggunakan bahasa yang santun dan tidak menggunakan kekerasan, tapi saat dibawa ke kantor saya tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Gelandangan dan Pengemis tersebut.”

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama Bapak Ade selaku wirausaha atau penjual es dawet ayu di sekitaran lampu merah Geroga

Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis, berikut hasil wawancaranya:

“Selama saya berjualan disini saya pernah memperhatikan beberapa kali Satpol PP saat razia Gelandangan dan Pengemis, mereka menangkap dan mengumpulkan Gelandangan dan Pengemis di dalam Mobil patroli selanjutnya diberi penyuluhan, dan jika ditanya mengenai etika Satpol PP saat menertibkan Gelandangan dan Pengemis mereka sesuai dengan aturannya. Soalnya saya juga pernah dirazia oleh Satpol PP dan mereka menegur dan memberi peringatan agar tidak berjualan terlalu dekat kejalan.”

Dari keterangan yang telah di berikan oleh dua masyarakat sekitar bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja yang berada diKecamatan Bathin Solapan Duri Kabaupaten Bengkalis melakukan penertiban sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku dengan prinsip humanisme yakni memanusiakan manusia.

Wawancara selanjutnya bersama Bapak Sandi Handoko selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis, berikut hasil wawancaranya:

“Jadi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis kami mempunyai tiga upaya yaitu operasi penertiban, penangkapan, dan juga rehabilitas yang di tangani oleh Dinas Sosial setempat atau pemulangan para Gelandangan dan Pengemis ke daerah asal mereka dalam melakukan penertiban kami diarahkan langsung oleh komandan dan sekaligus di pantau oleh komandan. Mengenai nada yang tinggi atau suara yang agak lantang saat melakukan penertiban dikarenakan oleh Gelandangan dan Pengemis itu sendiri yang tidak mengindahkan atau tidak peduli dengan himbauan yang kami berikan karena pada hakikatnya kami dalam menjalankan tugas harus tegas”.

### C. PEMBAHASAN PENELITIAN

Etika komunikasi merupakan cara seseorang dalam menyampaikan pesan kepada orang lain dengan ketentuan moral yang berlaku. Etika komunikasi sering kali di lakukan dikalangan masyarakat, baik itu formal

maupun non formal secara individu maupun kelompok. Etika komunikasi sangat di perlukan pada setiap organisasi termasuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Setiap komunikasi pasti ada proses, oleh karena itu apakah pesan tersebut dapat tersampaikan atau tidak itu tergantung proses yang terjadi saat komunikasi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh (Ruslan,2006:81). “Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan (*messages*) dari pengiriman pesan sebagai komunikator dan penerima pesan sebagai komunikan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh umpan balik (*feedback*) sehingga tercapai saling pengertian (*mutual understanding*) antara kedua belah pihak”.

Sebagai penegak peraturan daerah lembaga teknis yang berhadapan langsung dengan masyarakat khususnya pengemis dan juga dalam melaksanakan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan kepatuhan, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, maka tindakan dipolakan dalam tahapan-tahapan yakni himbauan, peringatan, tindakan.

Etika komunikasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis masih adanya komplain dari Gelandangan dan Pengemis ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban, yang mana masih adanya oknum dari Polisi Pamong Praja menggunakan bahasa yang kurang baik dengan nada yang tinggi seperti membentak.

Kegiatan penertiban di lapangan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja tidak lepas dari adanya faktor pendukung dan juga penghambat. Diantara faktor penghambatnya adalah kurangnya dana operasional, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan juga ada oknum yang membocorkan informasi terkait dengan penertiban yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap gelandangan dan pengemis. Dan faktor pendukungnya yaitu dukungan penuh dari camat di Kecamatan Bathin Solapan.

mengenai penertiban yang dilakukan oleh satuan polisis pamong praja meliputi himbauan terdiri dari pemberian penerangan, dan pendekatan persuasif (peringatan), apabila tindakan ini sudah dilakukan dan masih ditemukan pelanggaran maka pola tindakan berikutnya adalah dengan pola prefentif (tindakan) yang dilakukan baik dengan patroli, pengawasa, penjagaan atau penghalauan, pemeriksaan setempat, dan dengan teguran lisan atau tulisan ini disebut juga dengan peringatan, dan Apabila pola tindakan yang kedua telah dijalankan dan masih di temukan pelanggaran yang sama oleh gelandangan dan pengemis maka tindakan terakhir adalah dengan refresif yaitu dengan Yustis yaitu melakukan sidang pengadilan.

Alasan gepeng melakukan kegiatannya yaitu adanya masalah ekonomi yang selalu menjadi perhatian umum di indonesia pada saat ini dengan meningkatnya masalah ekonomi lalu muncul lah berbagai masalah sosial yang di alami masyarakat karena tingkat ekonomi sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan dengan kondisi seperti saat ini

dimana susahnya mencari pekerjaan yang membuat masyarakat tidak tau harus mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan jalan pintas satu-satunya yang diambil oleh masyarakat adalah menjadi pengemis atau gelandangan dan semakin banyaknya orang yg mengemis atau meminta-minta di setiap lampu merah membuat sebagian masyarakat tidak nyaman atau resah dan dari ketidaknyaman tersebutlah masyarakat memberi laporan atau pengaduan agar pengemis dan gelandangan ini dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang atau Satuan Polisi Pamong Praja. Gelandangan dan pengemis yang berada di Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis rata-rata tidak memiliki tempat tinggal tetap, mereka biasanya tinggal di emperan toko dan tepian jalan.

Dari adanya laporan dari masyarakat setempat maka Satuan Polisi Pamong Praja akan terjun langsung untuk melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis, baik itu yang sudah sering dijumpai maupun tidak tetapi jika gelandangan atau pengemis yang ditangkap sudah lebih dari 3 kali penangkapan maka gelandangan dan pengemis tersebut akan diopor ke dinas sosial untuk di tindak lanjuti karena jika tidak ditindak akan terus menyebar dan tidak ada perubahan, masalah sosial gelandangan dan pengemis ini merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari lagi dalam kehidupan masyarakat terutama yang berada di daerah perkotaan sehingga menyebabkan pengemis dan gelandangan adanya razia yang dilakukan guna untuk menciptakan kerukunan, keindahan, dan ketertiban umum, untuk memutus mata rantai kehidupan.

Jika sudah dilaksanakannya razia terhadap gelandangan dan pengemis lalu akan di proses dikantor dengan diberikannya arahan, peringatan, agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan pengemis dan gelandangan tersebut guna untuk menertibkan lingkungan sekitar. Dan agar tidak adanya kegiatan meminta-minta di pinggir lampu merah yang terkadang membuat resah masyarakat. Seperti yang kita ketahui makin bertambahnya gelandangan dan pengemis di dasari dengan beberapa faktor, faktor yang paling utama yaitu faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan dan kurangnya kasih sayang dari orang tua dan keluarganya, kurangnya rasa kepedulian sesama saudara, dan setelah dilakukannya observasi atau wawancara terhadap gelandangan dan pengemis tersebut kebanyakan dari mereka berasal dari perdesaan dimana mereka merantau ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan setelah sampai dikota pekerjaan yang diharapkan tersebut sulit di dapatkan, dikarenakan sistem syarat mencari pekerjaan dikota harus berpendidikan minimal tamat SMA, sedangkan kebanyakan dari mereka SD saja tidak tamat. mereka berfikir cara lain untuk mendapatkan uang dengan cepat yaitu dengan cara mengemis karena dengan kebiasaannya mengemis mereka tidak berfikir untuk berusaha mencari pekerjaan lainnya. untuk melanjutkan kehidupan di perantauan atau dikota.

Dan tidak hanya sekedar melakukan razia biasanya pada saat berjalannya razia bukan hanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja saja yang turun, biasanya ketua Satuan Polisi Pamong Praja juga langsung turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi, dan juga agar adanya

pertanggung jawaban apabila jika ada yang meragukan razia yang sedang dilaksanakan salah satu anggota gunanya ketua ikut andil adalah ketua dapat memberi surat (SPT) dari pemimpin agar menguatkan razia yang sedang dilakukan agar pengemis dan gelandangan tidak menganggap remeh razia tersebut karena Satuan Polisi Pamong Praja ini juga bukan sembarang turun ke jalan untuk melakukan razia tersebut tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ini tergantung arahan dari pimpinan yaitu camat guna untuk menjaga ketentraman dan ketertiban.

Agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan sebelum Satuan Polisi Pamong Praja terjun langsung ke jalan untuk melaksanakan razia adanya brifing terlebih dahulu dan di dalam brifing tersebut yang selalu di bahas adalah sopan santun, tegas dalam bertindak tidak melakukan kekerasan dan pastinya harus memiliki sifat pembinaan. Dengan diadakannya brifing ini sebelum terjun ke jalan agar dapat membuat situasi yang kondusif agar razia yang dilaksanakan dapat berjalan dengan aman tidak timbul keributan saat melakukan razia.

Tidak luput SOP dalam penertiban ini juga harus diterapkan agak penertiban yang dilakukan berjalan sesuai prosedur yang berlaku tidak dengan asal-asalan, SOP nya berupa surat perintah kerja (SPT), memberikan arahan kepada anggota mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, sopan santun, dan yang terakhir memberikan laporan hasil kerja.

Kebijakan merupakan prinsip yang dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi dan sebagai suatu proses kebijakan

pemerintah dalam menangani masalah Gelandanga dan pengemis ini dimana suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar atau negosiasi untuk merumuskan isu-isu atau dan metode implementasinya.

Masalah ini merupakan masalah klasik dalam urbanisasi, di daerah Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis, menangani kelompok ini sama seperti menangani masalah kemiskinan yang tersulit. Kelompok Gelandangan dan pengemis merupakan kelompok khusus yang memiliki karakteristik serta pola penanganan khusus, terutama berkaitan dengan mentalitas dan tata cara hidup mereka yang sedikit banyak sudah terkontaminasi dengan budaya yang dijalankan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum khususnya mengenai gelandangan dan pengemis di kecamatan bathin solapan Duri Kabupaten Bengkalis, dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bathin solapan Duri Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan aturan yang dijalankan yaitu himbauan, peringatan dan tindakan. adanya pengaduann yang kurang baik dari Gelandangan dan Pengemis mengenai nada yang tinggi atau bahasa yang kurang baik kepada mereka (Gepeng) seperti membentak bisa dibilang karena Gelandangan dan Pengemis nya sendiri yang tidak bisa di peringatin dan mengulangi kegiatannya, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban harus tegas karena itu sudah menjadi tuntutan mereka, jika Satuan Polisi Pamong Praja tidak menindak tegas maka Gelandangan dan Pengemis tidak akan merasa takut atau terancam saat melakukan kegiatannya, dan pada hakikatnya manusia juga mempunyai batas kesabaran termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, jika Gelandangan dan Pengemis tidak bisa diperingati maka peneliti menganggap pembentakan atau nada tinggi yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja masih dalam konteks yang wajar.

## B. Saran

Seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bathin Solapan Duri Kabupaten Bengkalis bisa bekerja sama dengan Dinas Sosial dan turun langsung kelapangan bersama melakukan penertiban, memberikan tempat penampungan seperti panti untuk para Gelandangan dan Pengemis, dan Satuan Polisi Pamong Praja juga harus menggunakan Etika dalam berkomunikasi dengan berpedoman kepada SOP saat dilakukannya penertiban, serta pemerintah setempat harus juga memperhatikan sarana dan prasarana serta dana operasional untuk Satuan Polisi Pamong Praja agar Satuan Polisi Pamong Praja juga dapat bersemangat dalam melakukan penertiban.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aprita, Serlika. 2020. *Etika Profesi*. Qiara Media:Jawa Timur
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Pk*. Rakti Rineka Cipta:Jakarta
- Azis,Abdul. 2019. *Pedoman Penulisan usulan penelitian dan skripsi*.Fakultas Ilmu Komunikasi UIR: Pekanbaru
- Cangara, Hafied. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Devito, Joseph A. 2011. *Komunikasi Antar Manusia*. Karisma Publishing Group:Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Dinamika Komunikasi*: PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Herlambang, S. 2014. *Perilaku Organisasi*. Gosyen Publishing:Yogyakarta
- Kriyatno, Rachmat. 2006. *Teknik praktis komunikas, Riset komunikasi*. Kencana:Jakarta
- Lobolo, Muadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Marheani Fajar. 2009. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Graha Ilmu:Yogyakarta
- Mufid, M. 2012. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Kencana:Jakarta
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*.PT Bumi Aksara:Jakarta
- Makarim, Mufti. & Hidayat, Papang. 2012. *Panduan Hak Asasi Manusia Bagi Satuan Polisi Pamong Praja*. Cirebon:Focusmedia.
- Subagyo, Joko. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*.Rineka Cipta:Jakarta.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Alfabeta:Bandung
- Suradinata. 2009. *Perbandingan Sistem Politik*. Mecphiso Grafika:Surabaya Tim Kreatif. 2010. *Peraturan Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)*.Fokusmedia:Jakarta

Wiryanto. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Andi Yogyakarta

Yuwono, Ismantoro. 2018. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Media Presindo:Yogyakarta

### **Jurnal atau Skripsi**

Anggriawan Arga, Priyan. 1434 H/2013 M. “Etika Komunikasi Kelompok Pemulung Di Jalan Bri Radio dalam Gandaria Utara Jakarta Selatan”. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Azmi Ulul. 2017. “Etika Komunikasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus Ibu Asni dan Pembelinya, Di Warung Taman Puri Jl. Bunghatta, Taman Kota Wilayah Mataram)”. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK). Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram.

Dwi Yuwono, I. 2018. “ Memahami berbagai etika profesi dan pekerjaan”.

Erdilla, R. Andry. H. 2015. “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan pengemis Di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 1(2):196-213.

Fariyah, Ita. 2019. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Palembang”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya, Palembang.

Fitriah Maisyarah. 2018H/2019M. “Etika Komunikasi Personal Dalam Prespektif Perawat Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.

Novia, I. Sugandi, dan Wibowo, W. (2018) . Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Melalui Komunikasi Persuasif Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.6(3):648-662.

Rosanti, Dwi. 2019. “Etika Komunikasi Mahasiswa Aktivistis Kampus DI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

## Web

Wikipedia. 2020. Polisi Pamong Praja- Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (internet). Diunduh 29 Oktober 2020. Tersedia pada: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi\\_pamong\\_praja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi_pamong_praja).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau